

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi sehingga pada penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Khususnya Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan permasalahan mengenai Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal Dan Transparansi Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta. Waktu penelitian ini dimulai dari mengumpulkan data yang terkait sampai hasil penelitian memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan September 2023 sampai dengan Desember 2023.

#### 3.2 Desain Penelitian

Pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut menurut Purwohedhi (2022) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Prinsip dan Praktik” menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan survei, eksperimen, dokumen perusahaan maupun data-data kuantitatif yang dipublikasikan. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Rappingah, Dkk (2022) penelitian kuantitatif adalah penyelidikan teroganisir tentang fenomena atau permasalahan melalui pengumpulan data numerik dan pelaksanaan teknik statistic atau komputasi. Sumber penelitian kuantitatif adalah paradigma positivisme yang menganjurkan pendekatan statistik seperti statistic inferensial, pengujian hipotesis, pengacakan desain eksperimental dan kuisisioner dengan variasi terbatas dan jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya.

#### 3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Purwohedhi (2022) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Prinsip dan Praktik” menyebutkan bahwa poulasi adalah seluruh data yang tersedia untuk penelitian. Sedangkan menurut Swarjana (2022) populasi adalah keseluruhan kelompok individu-individu, kelompok, atau objek dimana kita menggeneralisasikan hasil penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Staf Akuntansi yang bekerja di kantor Pemprov DKI Jakarta yang berjumlah sebanyak 48 orang, jumlah ini peneliti peroleh dari ibu Heni selaku Staff Akuntansi Senior.

Selanjutnya sample menurut Purwohedi (2022) dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Prinsip dan Praktik” menyebutkan bahwa sample merupakan bagian dari populasi yang akan digunakan sebagai data penelitian. Sedangkan menurut Swarjana (2022) sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat-sifat tertentu dari populasi induk. Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel diambil dari staff akuntansi yang bekerja pada kantor Pemerintah Provinsi Jakarta. Kuesioner yang disebar kepada staff akuntansi yang bekerja pada kantor Pemerintah Provinsi Jakarta. Penyebaran kuesioner penelitian ini menggunakan Google Form dan akan menyebarkan *link* tersebut kepada 30 responden yang berada di Pemerintah Provinsi Jakarta. Setelah dilakukan survei ternyata jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 30 yang diperoleh dari pekerja Pemerintah Provinsi Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive Sample*, dimana dalam pengambilan ini, kriteria yang digunakan adalah pegawai yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

### 3.4 Pengembangan Instrumen

Pengembangan instrumen yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari variable independen yaitu Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Pengawasan Internal (X2), Transparansi (X3) dan variabel dependen yaitu kinerja instansi pemerintah (Y). Penyusunan instrumen dalam penelitian ini berupa definisi operasional, indikator, item pertanyaan dan alat ukur penelitian. Definisi operasional setiap variabel yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

#### 3.4.1 Kinerja Instansi (Y)

##### a. Definisi Konseptual

Menurut Novarian dan Kurniawan (2020) Kinerja sejatinya adalah pencapaian sebuah kegiatan yang telah melebihi standar atau sasaran yang ditetapkan. Di dalam konteks organisasi pemerintah, kinerja juga dapat bermakna kegiatan yang dilaksanakan telah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagai *Stakeholder* utama pemerintah. Menurut Bastian (2021) kinerja adalah

gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Definisi konseptual kinerja instansi mengacu pada kerangka kerja konsep dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pemahaman tentang kinerja instansi atau organisasi. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang apa yang dianggap sebagai "kinerja" dalam konteks instansi tersebut, serta konsep-konsep abstrak yang memandu pengukuran dan evaluasi kinerja. Definisi konseptual kinerja instansi mencakup prinsip-prinsip seperti:

- 1) Tujuan dan Misi: Ini mencakup pemahaman tentang tujuan dan misi yang diemban oleh instansi tersebut, dan bagaimana kinerja diukur dalam mencapai tujuan tersebut.
- 2) Keberhasilan: Bagaimana keberhasilan atau pencapaian instansi tersebut diartikan dan diukur, baik dari perspektif internal maupun eksternal.
- 3) Relevansi: Konsep tentang relevansi indikator kinerja yang digunakan, yaitu sejauh mana pengukuran kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan misi instansi.
- 4) Transparansi: Bagaimana informasi kinerja disampaikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum.
- 5) Dampak: Konsep dampak sosial atau ekonomi dari kinerja instansi, yaitu bagaimana aktivitas instansi memengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Definisi konseptual kinerja instansi membantu membentuk kerangka kerja yang akan digunakan untuk merancang sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan instansi tersebut. Ini memastikan bahwa evaluasi kinerja berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi organisasi.

#### b. Definisi Operasional

Definisi operasional kinerja instansi mengacu pada langkah-langkah konkret dan ukuran yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja atau hasil kerja suatu instansi atau organisasi. Ini termasuk metode

pengumpulan data, indikator kinerja, dan prosedur evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi tersebut mencapai tujuan, misi, atau targetnya. Definisi operasional kinerja instansi bisa berbeda tergantung pada jenis instansi atau organisasi yang dimaksud. Namun, dalam konteks umum, hal ini mencakup pengembangan metrik yang relevan dan terukur, seperti output, efisiensi operasional, kualitas layanan, dan dampak sosial atau ekonomi dari aktivitas instansi tersebut.

Tujuan utama dari definisi operasional kinerja instansi adalah untuk memungkinkan pengukuran kinerja yang objektif dan akurat, sehingga instansi tersebut dapat memantau kemajuan, mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan, dan membuat keputusan berdasarkan data yang relevan.

### 3.4.2 Akuntansi Sektor Publik (X1)

#### a. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual akuntansi sektor publik mengacu pada kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar dan panduan umum dalam akuntansi sektor publik. Definisi konseptual akuntansi sektor publik mencakup konsep-konsep abstrak yang menjadi dasar pemahaman dan pelaksanaan akuntansi sektor publik. Beberapa prinsip konseptual yang umumnya termasuk dalam kerangka kerja konseptual akuntansi sektor publik meliputi:

- 1) Keandalan (*reliability*): Informasi akuntansi sektor publik harus dapat diandalkan dan benar, sehingga pemakai informasi dapat mengandalkan data tersebut untuk mengambil keputusan.
- 2) Keterbandingan (*comparability*): Informasi harus dapat dibandingkan dari periode ke periode dan antara entitas sektor publik, sehingga pemakai informasi dapat memahami perubahan dari waktu ke waktu.
- 3) Konsistensi (*consistency*): Prinsip-prinsip dan metode akuntansi sektor publik harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk perubahan.

- 4) Keterwakilan yang adil (*fair presentation*): Informasi akuntansi sektor publik harus memberikan gambaran yang adil dan wajar tentang posisi keuangan dan hasil operasi entitas sektor publik.
- 5) Sumber daya ekonomi (*economic resources*): Fokus utama akuntansi sektor publik adalah pada pengukuran, pelaporan, dan pengendalian sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas sektor publik.

Kerangka kerja konseptual akuntansi sektor publik ini membantu memandu penyusunan standar akuntansi sektor publik, pedoman pelaporan, dan praktik akuntansi yang sesuai dengan karakteristik khusus sektor publik, seperti tujuan publik dan transparansi..

#### b. Definisi Operasional

Operasional akuntansi sektor publik mengacu pada metode dan praktik akuntansi yang digunakan dalam entitas sektor publik, seperti pemerintah dan lembaga-lembaga non profit. Ini mencakup prosedur yang digunakan untuk merekam, melaporkan, dan mengelola transaksi keuangan sektor publik. Definisi berbeda-beda di berbagai negara, tetapi secara umum mencakup pedoman dan standar akuntansi yang berlaku, seperti *international public sector accounting standards (IPSAS)* atau *governmental Accounting standards boards (GASB)* di Amerika Serikat. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan pelaporan yang akurat terkait dengan keuangan entitas publik.

### 3.4.3 Pengawasan Internal (X2)

#### a. Definisi Konseptual

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2016)

Definisi Konseptual pengawasan internal mengacu pada kerangka kerja konsep dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar pemahaman tentang pengawasan internal dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan pemahaman

tentang tujuan, peran, dan fungsi pengawasan internal, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Beberapa unsur penting dalam definisi konseptual pengawasan internal meliputi:

- 1) Tujuan: Memahami bahwa tujuan pengawasan internal adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan misi, serta untuk melindungi kekayaan organisasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan efisiensi operasional.
- 2) Independensi: Prinsip bahwa pengawasan internal harus independen dari fungsi dan aktivitas yang sedang diawasi. Ini untuk memastikan objektivitas dalam penilaian dan laporan.
- 3) Evaluasi Risiko: Pengawasan internal harus memahami dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut.
- 4) Penilaian dan Rekomendasi: Pengawasan internal harus memberikan penilaian dan rekomendasi yang konstruktif kepada manajemen untuk perbaikan operasional dan pengendalian internal.
- 5) Transparansi: Prinsip bahwa laporan hasil pengawasan internal harus disampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan dengan cara yang transparan.

Definisi konseptual pengawasan internal membantu membentuk kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan aktivitas pengawasan internal. Ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan internal berfungsi efektif dalam mendukung tujuan dan keberhasilan organisasi serta dalam menjaga akuntabilitas dan integritas.

#### b. Definisi Operasional

Definisi operasional pengawasan internal adalah serangkaian tindakan praktis dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh fungsi pengawasan internal dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa kontrol dan prosedur pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya, serta untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Ini mencakup aktivitas-aktivitas seperti:

- 1) Pemantauan: Melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas operasional dan transaksi organisasi untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan atau risiko.
- 2) Evaluasi Pengendalian Internal: Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang ada dalam organisasi untuk memastikan bahwa risiko-risiko diidentifikasi dan dikelola.
- 3) Audit: Melakukan audit internal untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur organisasi, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- 4) Pelaporan: Menyampaikan laporan hasil evaluasi dan temuan kepada manajemen dan pemangku kepentingan terkait, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- 5) Penyusunan Prosedur: Mengembangkan dan merevisi prosedur pengendalian internal yang sesuai untuk organisasi.
- 6) Kepatuhan dan Integritas: Memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga integritas dalam aktivitasnya.

Definisi operasional pengawasan internal memberikan panduan konkret tentang bagaimana fungsi pengawasan internal melakukan pekerjaannya dalam rangka mendukung tujuan organisasi, meningkatkan pengendalian, dan memberikan manfaat kepada manajemen dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerja..

#### 3.4.4 Transparansi (X3)

##### a. Definisi Konseptual

Menurut Restuani dan Budi (2022) transparansi berarti keterbukaan (*opensess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Definisi konseptual transparansi merujuk pada prinsip-prinsip dan konsep yang mendasari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan transparansi dalam konteks berbagai aspek, seperti pemerintah, bisnis, atau

organisasi. Transparansi mengacu pada tingkat keterbukaan, keterlacakan, dan keterpaparan informasi yang dimiliki atau dihasilkan oleh entitas tertentu.

Definisi konseptual transparansi membentuk dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang mendukung transparansi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan organisasi non-profit, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional transparansi adalah serangkaian tindakan praktis dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh suatu entitas atau organisasi untuk memastikan bahwa informasi dan aktivitas mereka terbuka, dapat diakses, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Ini melibatkan implementasi kebijakan, praktik, dan prosedur yang mendukung prinsip-prinsip transparansi. Beberapa contoh tindakan operasional yang mendukung transparansi meliputi:

- 1) Publikasi Informasi: Menyediakan informasi relevan dan penting kepada pemangku kepentingan melalui publikasi daring atau laporan berkala.
- 2) Keterbukaan Keuangan: Membagikan laporan keuangan, anggaran, dan catatan-catatan keuangan untuk memungkinkan pemangku kepentingan memahami keuangan organisasi.
- 3) Konsultasi Publik: Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan.
- 4) Audit Terbuka: Menjalankan audit internal dan eksternal yang transparan serta melaporkan hasilnya kepada pihak berkepentingan.
- 5) Pelaporan Keberlanjutan: Organisasi bisnis sering menghasilkan laporan keberlanjutan yang mencakup dampak sosial dan lingkungan mereka.
- 6) Pemantauan Kinerja: Menyediakan pemantauan kinerja yang dapat diakses oleh pihak berkepentingan dan mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuannya.

Definisi operasional transparansi membantu organisasi menerjemahkan prinsip-prinsip transparansi menjadi tindakan nyata yang mendukung keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, dan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Tabel 3.1 Indikator Kuesioner

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Variabel Independen (X)		
Akuntansi Sektor Publik	1) Kepatuhan	a. Ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
	2) Akuntabilitas	b. Pertanggungjawaban kerja seseorang atau sebuah organisas.
	3) Perencanaan	c. Menentukan tujuan organisasi, serta cara terbaik untuk mencapai tujuan.
	4) Pengikhtisaran	d. Membuat ringkasan dari data keuangan yang sudah diproses sebelumnya
	5) Pelaporan	e. cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan

informasi keuangan  
perusahaan tersebut

Pengawasan  
Internal

1) Lingkungan  
Pengendalian

2) Informasi dan  
komunikasi

3) Pemantauan

4) Aktivitas  
pengendalian

5) Penaksiran Risiko

- a. Nilai integritas dan etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Filosofi dan struktur organisasi.
- d. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
- e. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
- f. Identifikasi dan pengelolaan risiko berkaitan dengan laporan keuangan sesuai dengan prinsip.
- g. Mampu menyampaikan informasi tentang aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi.
- h. Terdapat kebijakan pengendalian untuk mengurangi risiko.

		i. Terdapat penilaian kualitas kerja.
Transparansi	1) Informatif	a. Jelas, akurat dan Tepat Waktu
	2) Keterbukaan	b. Mudah Diakses
	3) Pengungkapan	c. Memadai
		d. Dapat diperbandingkan
		e. Setiap informasi publik harus bersifat terbuka
		f. Setiap informasi publik harus mudah diakses
		g. Kondisi Keuangan
		h. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan
		i. Susunan Pengurus

#### Variabel Dependen (Y)

Kinerja Instansi Pemerintah	1) Relevan	a. Sesuai dengan PSAK, memiliki manfaat prediktif dan menyelesaikan tepat waktu.
	2) Andal	b. Informasi disajikan sesuai, jujur, benar dan netral serta dapat diverifikasi.
	3) Dapat dibandingkan	c. Membandingkan periode laporan keuangan tahun
	4) Dapat dipahami	

lalu dan tahun sekarang.

Serta perbandingan dapat dilakukan secara eksternal dan internal.

- d. Laporan yang dibuat mudah dipahami dan jelas.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data-data tersebut adalah data yang diolah dalam bentuk angka yang sebelumnya sudah didapat dari skala kuesioner yang sudah disebar oleh peneliti melalui auditor Inspektorat Jendral Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya data diolah menggunakan software SPSS 26. Kuesioner yang dibagikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data dari penelitian ini adalah Staf Akuntansi Pemerintah Provinsi Jakarta. Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data adalah dengan cara melakukan metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner, dalam hal ini peneliti melakukannya dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data dari pihak yang bersangkutan secara langsung atau dapat disebut juga data primer. Menurut Rosini (2023) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Dalam pengambilan hasil kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode ukur skala *likert* yaitu yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang. Skala *Likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial. Terdapat dua bentuk pertanyaan dalam skala likert, yaitu bentuk pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur skala negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5,

4, 3, 2, dan 1; sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. (Bahrin, Alifah, & Mulyono, 2018).

Tabel 3.2 Bobot Kuesioner Berdasarkan pada Metode Skala Likert

No	Sikap	Skala
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu- ragu	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

Dengan pengukuran skala likert, maka variabel yang didapat akan diukur dengan menjabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya indikator tersebut akan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang telah didapat sebelumnya yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner dalam bentuk berupa pertanyaan-pertanyaan.

## 2. Data Sekunder

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan studi penelaahan melalui buku-buku, catatan-catatan, literatur-literatur serta laporan keuangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data yang diambil dalam penelitian ini dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dibahas dalam penelitian ini serta buku-buku literatur dan informasi yang berkaitan langsung dengan penelitian dari *website* Pemerintah Provinsi Jakarta.

## 3.6 Teknik Analisis Data

### 1. Uji Deskriptif

Dalam penelitian ini uji deskriptif yang digunakan berfungsi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat memberikan

informasi tentang ciri atau karakteristik variabel-variabel penelitian yang utama. Menurut Siregar (2023) uji deskriptif adalah bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Jika hipotesis ( $H_a$ ) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Uji ini menggunakan satu variabel atau lebih tetapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.

## 2. Uji Kualitas

Dalam penelitian ini penulis melakukan uji kualitas atas data yang dimiliki dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut:

### a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, atau sejauh mana alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Semakin tinggi validitas suatu alat test, maka alat tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar-benar cocok atau sesuai sebagai alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari kuisisioner dari responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam penelitian ini atau tidak.

Bila suatu alat ukur sudah dikatakan valid, maka selanjutnya dapat dilakukan pengujian reliabilitas alat ukur. Sebaliknya bila alat ukur dikatakan tidak valid, maka alat ukur yang telah digunakan sebelumnya harus dievaluasi atau diganti dengan alat ukur yang lebih tepat/efektif

Rumus untuk menguji validitas data adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n(\sum XY) - \sum X \sum Y}{\sqrt{[\sum (n \sum X^2 - (\sum X)^2)] - [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

$r$  = Koefisien validitas item yang dicari

$X$  = Skor yang diperoleh subjek dalam setiap item

$Y$  = Skor total yang diperoleh subjek dari seluruh item

$\sum X$  = Jumlah skor dalam distribusi  $X$

$\sum Y$  = Jumlah skor dalam distribusi  $Y$

$\sum X^2$  = Jumlah kuadrat masing-masing skor  $X$

$\sum Y^2$  = Jumlah kuadrat masing-masing skor  $Y$

$n$  = Banyak responden

Kriteria pengujian adalah :

$r_{hitung} > r_{tabel}$  (Valid)

$r_{hitung} < r_{tabel}$  ( Tidak Valid)

b. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu, yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Tujuan dari Uji Normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau variabel keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki hasil data yang normal atau mendekati normal. Adapun cara yang dilakukan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidaknya dapat dilakukan dengan cara uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) test yang terdapat di program SPSS 26. Dalam teknik kolmogorov smirnov memiliki kriteria jika signifikansi dibawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, sedangkan jika signifikansi diatas 0,05 maka data berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi linear yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel independent. Idealnya variabel-variabel independent dari persamaan regresi tidak memiliki korelasi satu dengan lainnya. Kalaupun terdapat korelasi antar variabel independent maka tingkat korelasi tersebut haruslah rendah agar supaya tidak terjadi masalah akibat multikolinieritas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen tidak saling berhubungan. Syarat sebagai indikator yang bisa dirumuskan adalah  $VIF > 10$  atau  $tolerance < 0,10$  maka terjadi gejala Multikolinieritas, sebaliknya apabila  $VIF < 10$  dan  $tolerance > 0.10$  maka tidak terjadi gejala Multikolinieritas.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser yaitu dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = 0$  {tidak ada masalah heteroskedastisitas }

$H_1: \beta_1 \neq 0$  {ada masalah heteroskedastisitas }

Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## 4) Metode Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang telah diungkapkan, maka dibutuhkan pengujian

hipotesis yang sesuai terkait hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t). Adapun penjelasan dari masing-masing pengujian adalah sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik model yang diterapkan dapat menjelaskan variabel terikatnya atau menunjukkan persentase pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Sugiyono, 2018)

Koefisien determinan ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinan ( $R^2$ ) antara 0 sampai 1. Jika koefisien determinan 0 berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinan semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Karena variabel independen pada penelitian ini lebih dari 2, maka koefisien determinan yang digunakan adalah adjusted R square. Dari determinan ( $R^2$ ) ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam persentase. (Ghozali, 2018).

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang di uji pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  artinya kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kemelesetan 5%. Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05

maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Kriteria Pengambilan Keputusan Hasil t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai sig. < 0,05, maka hipotesis diterima (signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.
- Jika nilai sig. > 0,05, maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

c. Uji Koefisien Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel dependen. Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. (Kurniawan, 2017). Berikut adalah persamaan regresi linier berganda yang digunakan oleh peneliti adalah, sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots$$

Keterangan :

Y: Kinerja Intansi Pemerintah

$\beta_1 X_1$ : Penerapan Akuntansi Sektor Publik

$\beta_2 X_2$ : Pengawasan Internal

$\beta_3 X_3$ : Transparansi

$\alpha$ : Konstanta

e: Variabel Pengganggu